SALINAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI
PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA SENSOR FILM

LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang dibutuhkan pegawai pelaksana pelayanan publik yang profesional, bertanggungjawab, andal, responsif dan berkualitas di lingkungan Lembaga Sensor Film;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan perlu diberikan penghargaan dan sanksi disiplin kepada pegawai pelaksana pelayanan publik di lingkungan Lembaga Sensor Film;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga Sensor Film;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Tahun 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA SENSOR FILM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut dengan Unit Pelayanan adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan di lingkungan Lembaga Sensor Film.
3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

5. Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi atas prestasi Satuan Kerja atau Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan secara adil dan obyektif.
6. Sanksi adalah hukuman atas perilaku dan/atau hasil kerja yang buruk dari Unit/Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat merugikan penerima layanan serta mempengaruhi kinerja pelayanan publik Lembaga Sensor Film.
7. Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan kepada masyarakat akibat dari tidak terpenuhinya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan
8. Tim penilai adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Ketua Lembaga Sensor Film untuk menilai kinerja layanan publik yang telah diterapkan.
9. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Ketua Lembaga Sensor Film untuk memverifikasi dan menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit kerja di lingkungan Lembaga Sensor Film dan dapat merangkap tim penilai.

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi

Pelaksana terdiri atas:

- a. meningkatkan prestasi kerja Pelaksana yang sesuai dengan
- b. meningkatkan disiplin Pelaksana dalam melaksanakan tugas

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- 1) Penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pengembangan kompetensi;
 - c. pengumuman sebagai Pelaksana berprestasi;
 - d. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Penghargaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan oleh Ketua Lembaga Sensor Film atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 4

- (1) Calon penerima penghargaan harus memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan Pelaksana yang mendapatkan penghargaan dibentuk Tim Penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam poin (2) diatas terdiri dari atas:
 - a. Wakil Ketua Lembaga Sensor Film;
 - b. Ketua Komisi yang membidangi layanan penyensoran;
 - c. Sekretaris LSF;
- (4) Penilaian dilakukan terhadap kriteria sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan di atas Standar Pelayanan yang ada;
 - b. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan; dan
 - c. Keramahan, kesopanan dan etika dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- (5) Tim penilai memberikan hasil penilaian dan mengusulkan hasil penilaian kepada Pimpinan terkait beserta rekomendasi bentuk penghargaan.
- (6) Pimpinan satuan kerja menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim penilai.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Bagian Keempat

Pasal 5

Bentuk Sanksi

Pengenaan sanksi dapat berupa:

- a. Proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk PNS;
- b. Proses hukuman disiplin sesuai Kontrak Kerja untuk Pegawai Non PNS.

Pasal 6

Prosedur Pengenaan Sanksi

- (1) Pengenaan sanksi bagi pelaksana berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Lembaga Sensor Film;
 - b. Melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Lembaga Sensor Film.
- (2) Atasan langsung wajib memonitor kinerja Pelaksana.
- (3) Apabila terdapat indikasi pelanggaran, atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Verifikasi dan Investigasi;
- (4) Atasan langsung atau pejabat yang berwenang, mengenakan sanksi kepada Pelaksana dengan mempertimbangkan laporan Tim Verifikasi dan Investigasi.

BAB IV

KOMPENSASI

Pasal 7

Bentuk Kompensasi

- (1) Kompensasi dapat berupa mendapatkan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masyarakat yang mendapatkan kompensasi akan diberitahukan secara tertulis.

Pasal 8

Prosedur Pemberian Kompensasi

- (1) Pemberian kompensasi kepada masyarakat didasarkan atas:
 - a. Masyarakat dilayani tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan/atau;
 - b. Pengaduan dari masyarakat yang sudah diverifikasi kebenarannya.
- (2) Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan agar sesuai standar pelayanan.
- (3) Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada masyarakat.
- (4) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perlakuan pelayanan secara khusus dengan percepatan durasi pelayanan dari yang semula selesai 3 hari menjadi 1 hari.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku saat ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM

REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ROMMY FIBRI HARDIYANTO